

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Penonaktifan NIK Bisa Tekan Alokasi Bansos

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memandang penonaktifan NIK akan membuat program bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.

Inggard menyatakan dukungannya atas program yang dilaksanakan oleh Dukcapil itu, apalagi program itu bermanfaat mengurangi beban keuangan daerah.

"Kami mendukung apa yang menjadi gerakan Pj Gubernur dalam rangka menyikapi KTP orang yang sudah tidak tinggal di Jakarta," ujar Inggard yang dikutip Kamis (27/6/2024).

Menurutnya, beban keuangan daerah semakin berat akibat besarnya biaya jaminan sosial yang tidak tepat sasaran. Karena itu, harus ada perbaikan agar program Bansos itu tersalurkan pada orang yang tepat.

"Kita punya anggaran untuk Bansos itu hampir 30 persen dari total APBD. Bisa dibayangkan kalau kita salah sasaran pada penyaluran Bansos ini dan itu, memengaruhi pembiayaan pembangunan kita," kata Inggard.

Lebih jauh, dampak dari salah sasaran penyaluran Bansos akibat akurasi data yang tidak bagus justru membebani masyarakat Jakarta. Karena itu, penonaktifan NIK merupakan

langkah tepat agar penggunaan keuangan daerah efektif dan tepat sasaran.

"Jangan sampai penduduk Jakarta terbebani oleh orang yang tidak tinggal di Jakarta atau disalahgunakan," tutur Inggard.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan apresiasinya atas dukungan Komisi A dalam rangka menertibkan NIK warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta. Program penonaktifan NIK ini baru dilakukan terhadap yang sudah wafat.

"Warga juga berhak menyanggah di posko kami di Kelurahan kalau ternyata masih tinggal di Jakarta," ungkap Budi.

Sampai saat ini Disdukcapil DKI sudah menonaktifkan KTP warga Jakarta sebanyak 284.614 jiwa.

Ratusan ribu KTP itu dinonaktifkan karena pemiliknya sudah tidak tinggal sesuai domisili atau pindah ke luar Jakarta.

"Jumlahnya saat ini sudah 284.614 (yang dinonaktifkan KTP nya)," ucap Budi.

Menurut Budi, penonaktifan KTP tersebut tidak mempengaruhi proses suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2024.

"Enggak maksudnya kecuali yang pindah ya tapi kalau yang di nonaktifkan di kita nanti ya kalau misalkan dinonaktifkan itu tidak mempengaruhi penonaktifan di KPU," katanya.

(faf)



Kompas.com/Kurnia Sari Aziza